

**ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA SEBELUM ADANYA PUTUSAN PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Fardiana Pradita

NIM. 115010109111013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama
Sebelum Adanya Putusan Perceraian
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK)**

Fardiana Pradita

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : fardiana.pradita@gmail.com

ABSTRAK

FARDIANA PRADITA, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, *Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Sebelum Adanya Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK)*, Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., Djumikasih, S.H., M.H.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa alasan pemohon tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran termohon mengalihkan kepemilikan harta bersama selama proses perceraian, pemohon dan termohon tidak membuat perjanjian kawin, masih ada kewajiban melunasi hutang, belum dimintakan dalam permohonan perceraian, dan proses perkara dengan permohonan komulasi memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak menerima permohonan pembagian harta bersama tersebut karena permohonan dinilai terlalu dini (Premature) sebelum adanya putusan perceraian. Maka perlu adanya penyuluhan hukum bagi instansi terkait seperti Pengadilan Agama untuk memberikan informasi tentang cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perceraian sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Kata kunci : Alasan Pemohon, Permohonan, Pembagian Harta Bersama, Putusan Perceraian

FARDIANA PRADITA, Pure Civil Law, Faculty of Law University Brawijaya, July 2013, *Reason the Litigant to Petition for Divided Wealth in the Marriage Before Decision of the Divorce (Study Decision Case Number 0276/Pdt/G/2011/PA/YK)*, Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., Djumikasih, S.H., M.H.

Based on this research, the writer obtain to answer the problems, that reasons the litigant causes afraid if the opposite of litigant shift the wealth in the marriage during the process divorce, the litigant and the opposite of litigant didn't make marriage agreement, must to pay a debt, petition for divided wealth in the marriage yet to please in the petition of divorce, and process to solving problem with communal petition need a long time. Whereas base and consideration the judge chamber didn't accept petition for divided wealth in the marriage because petition has a premature value, before the decision of divorce. then the suggestion is need a kind of share law explanation for government especially like religion court for given information about how to petition for divided wealth in the marriage within divorce so can give legal certainty and benefit for someone who find a justice.

Keywords : Litigant reason, Petition, Divided wealth in the marriage, Decision of divorce

A. PENDAHULUAN

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri.¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah memuat beberapa Pasal yang mengatur tentang harta bersama, seperti dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

(2) “Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) harta benda dalam perkawinan yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berkaitan dengan harta bersama ini masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya. Kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari salah satu pasangannya.²

Setiap pasangan suami istri hakikatnya mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam membina hubungan rumah tangga tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, adakalanya sebab-sebab tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau dengan kata lain terjadi perceraian. Terjadinya

¹ Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “*Burgerlijk Wetboek*” dan Undang Undang Perkawinan**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.1

² Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm.2

perceraian merupakan peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk salah satunya terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam sendiri hanya mengatur mengenai pengajuan gugatan perceraian, tanpa menyinggung pengaturan mengenai pengajuan gugatan pembagian harta bersama. Mengenai perselisihan terhadap pembagian harta bersama tersebut, Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Agama.

Hal ini berbeda dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, antara (TM) sebagai pihak pemohon yang mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian ataupun sesudah adanya putusan perceraian. Pada bulan April tahun 2011, (TM) sebagai pihak pemohon mengajukan cerai talak kepada (PSH) sebagai pihak termohon dalam perkara Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.Yk. Dalam proses cerai talak yang sedang berlangsung, Pemohon juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama pada bulan Juni 2011 dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk. Adapun penulis tertarik untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Pemohon dalam mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan cerai talak dan dasar pertimbangan hakim tidak menerima permohonan pembagian harta yang diajukan oleh Pemohon.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan pihak Pemohon mengajukan permohonan harta bersama sebelum adanya putusan perceraian?
2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK?

C. METODE

Jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian terhadap permasalahan hukum dilakukan dengan memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di masyarakat. Di dalam penelitian hukum empiris ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian mendeskripsikan terhadap hasil penelitian tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan atau melihat fakta yang ada.³ Yuridis karena menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat di Yogyakarta dengan mengkaji alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

³ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.4

Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara atau teknik mengumpulkan data yakni melalui wawancara kepada responden yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan sebagai data penunjang untuk membahas dasar teoritis dan penunjang penelitian lapangan dengan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan penelusuran melalui internet.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan dengan metode deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jl. Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta, Visi : Terwujudnya Peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju negara hukum yang adi

⁴ Nazir Mohammad, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.62

sedangkan Misi : Memberikan Pelayanan hukum sebaik – baiknya dengan biaya murah, cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum kota Yogyakarta , dengan cara:

- 1) Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa.
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
- 3) Menciptakan akses layanan hukum dan peradilan.
- 4) Menciptakan kualitas input eksternal pada proses peradilan
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan berkualitas.
- 6) Menciptakan aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan.

Tugas pokok Peradilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

2. Kasus Posisi Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK

Kasus dalam penelitian yang penulis teliti adalah kasus yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdaftar dengan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK. Perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Yogyakarta oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs Saifurrohman, S.H, Mhum sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Fauziah, S.H sebagai Hakim Anggota I, Drs.H Husaini Idris, S.H,Msi sebagai Hakim Anggota II dan dibantu Mokhamdan, S.H sebagai panitera pengganti.

Perkara permohonan pembagian harta bersama ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2011 terdaftar dengan register perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK, dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22

Ramadhan 1432 Hijriyah. Perkara ini terjadi antara suami dan istri, dimana saudara TM usia 40 Tahun memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Juni 2011 kepada Purwono, S.H, Daniel Tataq, S.H, dan Wahyubi Triatmojo, S.H selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Mengajukan permohonan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama Yogyakarta yang ditujukan kepada istrinya PSH usia 37 tahun, yang juga memberikan kuasa khususnya pada tanggal 6 Juli 2011 kepada Achiel Suyanto, S.H., M.H, Diana Eko Widyastuti, S.E., S.H, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Selama perkawinan tersebut berlangsung, diantara Pemohon dan Termohon berlaku percampuran harta karena tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan sehingga terbentuk harta bersama. Sejak bulan Desember tahun 2003 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 April 2011 karena adanya pengakuan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain. Adanya pengakuan tersebut mengakibatkan Pemohon berniat mengajukan permohonan cerai talak dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai. Pada tanggal 13 April 2011 Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta dan terdaftar dalam register perkara Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA/YK.

Pada tanggal 15 Juli 2011 pihak Pemohon juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan permohonan cerai *talak*nya. Permohonan pembagian harta bersama tersebut diajukan pada saat proses perceraian sedang berlangsung dan dimohonkan agar diputus lebih dahulu sebelum adanya putusan perceraian.

3. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Sebelum Adanya Putusan Perceraian.

Adapun diketahui adanya beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemohon dalam mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan cerai talak tersebut yang diperoleh dari hasil penelitian dengan responden-responden yang telah

ditentukan yakni berasal dari hasil wawancara kepada pihak Pemohon (TM) dan Drs. Mullawarman, S.H.,M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

a. Kekhawatiran Termohon Mengalihkan Kepemilikan Harta Bersama Selama Proses Perceraian

Alasan dalam hal ini dikarenakan Pemohon mengkhawatirkan Termohon dapat mengalihkan harta bersama, melakukan perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan terhadap keberadaan harta bersama mereka selama prsoses perceraianya sedang berlangsung dan sebelum adanya putusan perceraian.⁵

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut pihak Pemohon bermaksud melindungi harta bersama mereka dengan cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian atau setelah adanya putusan perceraian dengan maksud memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan yang dapat merugikan harta bersama mereka selama proses perceraianya sedang berlangsung ataupun sebelum ada putusan perceraian dan dapat menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas oleh karenanya menurut Penulis dalam melaksanakan pemindahtanganan harta bersama yang terdaftar terutama menggunakan nama isteri adalah lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa berkaitan dengan peralihan harta bersama tersebut dikemudian hari karena sering kali sengketa harta bersama dalam perkawinan terjadi karena proses peralihan tersebut tidak melibatkan salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan.

b. Pemohon dan Termohon Tidak Membuat Perjanjian Kawin Sehingga Untuk Melindungi Harta Bersama Selama Proses Perceraian, Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama

⁵ Hasil Wawancara dengan TM (Pemohon Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 1 April 2013

⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Mullawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

Pada kasus dalam penelitian ini antara pihak Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung, memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama. Hal tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon tidak membuat perjanjian kawin sebelumnya.⁷

Menurut Drs. Mulawarman, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama menilai bahwa permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon sebelum adanya putusan perceraian karena pada saat proses perceraianya sedang berlangsung, Pemohon menganggap perlu untuk mengajukan permohonan pembagian harta bersama untuk melindungi harta bersama yang mereka miliki agar tidak disalahgunakan karena tidak adanya perjanjian kawin tersebut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemohon, maka dalam hal ini menurut penulis karena kedua belah pihak juga sama-sama bekerja dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membawa harta bawaan dalam perkawinan dan tidak membuat perjanjian perkawinan. Sehingga manakala para pihak membutuhkan harta bersama maka diperlukan adanya pembagian secara adil dengan cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama.

c. Masih Ada Kewajiban Melunasi Hutang

Selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah mobil yang dibeli dengan sistem kredit yang masih belum dilunasi pembayarannya. Kredit tersebut harus dibayarkan setiap bulannya oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga menurut Pemohon hal tersebut perlu diatur pembagiannya dengan cara membagi jumlah kredit yang harus dibayarkan oleh Pemohon dan Termohon melalui permohonan pembagian harta bersama pada saat proses perceraianya

⁷ Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

sedang berlangsung yang diajukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹

Seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah *activa* dan *passiva*. Pengertian hak didalam Pasal tersebut menunjukan *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban membayar sejumlah hutang.¹⁰ Dengan demikian menurut Penulis, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian dipermasalahkan pembagian harta bersama mereka, maka yang dibagi bukan hanya yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukan sebagai harta bersama yang bersifat *passiva*. Drs. Mulawarman, S.H., M.H menambahkan bahwa berdasarkan hal tersebut adanya harta bersama dalam perkawinan tidak hanya terdiri dari harta kekayaan (*activa*) melainkan juga yang terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang (*pasiva*).¹¹

d. Belum Dimintakan Dalam Permohonan Perceraian

Setelah Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, dalam permohonan perceraian tersebut ternyata belum dicantumkan permohonan untuk pembagian harta bersama.

¹²

Sehingga terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang belum dimohonkan pembagiannya, maka menurut hukum dapat diajukan pembagiannya. Berdasarkan hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang diajukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian.¹³

⁹ Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

¹⁰ H.M Anshary, **Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 137-138

¹¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

¹² Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

¹³ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemohon, maka menurut Penulis untuk menghindari keadaan tersebut Pemohon bermaksud ingin memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan Termohon yang dapat merugikan harta bersama mereka selama proses perceraian.

e. Proses Perkara Permohonan Komulasi Memerlukan Waktu Cukup Lama

Menurut Pemohon, setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya alasan mengajukan permohonan pembagian harta bersama tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian dan sebelum adanya putusan perceraian adalah sebagai upaya untuk menghindari proses pembuktian yang membutuhkan waktu yang cukup lama.¹⁴

Menurut Drs. Mulawarman, S.H.,M.H Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, kendala-kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembagian harta bersama adalah dalam hal pembuktian antara lain:

- 1) Karena para pihak tidak memberikan data obyek sengketa secara akurat sehingga Hakim tidak bisa memutus secara mengkira-kira.
- 2) Kendala dalam menentukan harta bersama dan harta bawaan.
- 3) Kendala dalam sita jaminan terhadap harta bersama yang berbentuk simpanan di Bank.
- 4) Kedudukan hakim perdata adalah bersifat pasif sehingga tidak mencari kebenaran di luar apa yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, oleh sebab itu menurut penulis proses penyelesaian perkara dengan penggabungan gugatan (komulasi) biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, karena diperlukan pembuktian pada masing-masing tuntutan yakni pembuktian untuk perkara perceraian dan pembuktian untuk kebenaran status harta bersama.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan TM (Pemohon Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 1 April 2013.

4. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Tidak Menerima Permohonan Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK.

a. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).¹⁵

1) Dasar

Dalam hal ini dasar yang digunakan Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau *No (Niet In Onvankelijke Verklaar)* permohonan Pemohonan Pemohon dalam Nomor register perkara 0155/Pdt/G/2011/PA/YK adalah berpedoman dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”.¹⁶

Sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya hakim dalam memberikan putusan pada permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah terlalu dini (*Premature*) sehingga yang artinya permohonan tersebut tidak dapat diterima/ *No (niet*

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 223-224

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

ontvankelijke verklaard) menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan harta bersama

2) Pertimbangan

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hakim lebih menyarankan kepada para pihak untuk terlebih dahulu menunggu perkara perceraian sebagai perkara pokok untuk diberikan keputusan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu. Kemudian setelah perkara cerai telah selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dimiliki oleh suami istri tersebut. Hal ini didasari pada pengalaman dalam praktiknya bahwa kebanyakan suami dan istri bisa selesai atau sepakat di tahap Pengadilan Agama tingkat pertama.¹⁷

Berdasarkan aturan dalam pertimbangan untuk memberikan suatu putusan tersebut Hakim dalam memutuskan, dituntut untuk memberikan putusan yang tepat dan adil bagi para pihak. Adapun menurut Penulis, pertimbangan hukum dalam putusan pada perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk yang menyatakan tidak menerima permohonan pembagian harta besama yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan tersebut dinilai terlalu dini (*Premature*) adalah sudah tepat. Permohonan cerai merupakan tuntutan pokok sedangkan permohonan pembagian harta bersama merupakan tuntutan yang bersifat tambahan (*accessor*) sehingga permohonan pembagian harta bersama tidak dapat diputus lebih dahulu sebelum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap artinya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk sahnya suatu gugatan.

Di Indonesia, penyelesaian terkait masalah harta bersama antara suami istri diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

Tahun 1975. Akan tetapi, mengenai masalah pembagian harta bersama tersebut tidak diatur secara rinci. Di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara terhadap pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni: ¹⁸

a) Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Cara Perdamaian.

Penyelesaian perkara terhadap pembagian harta bersama menggunakan cara perdamaian atau mediasi yang biasanya tidak membutuhkan waktu yang berlaurut-larut, karena para pihak sepakat bersedia dan menerima pembagian harta bersama sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Para pihak yang bersengketa saling bersepakat menempuh jalan damai melalui akta perjanjian di depan sidang Pengadilan Agama. Isi perjanjian tersebut termasuk bagian dari putusan hakim sehingga para pihak harus melaksanakan sesuai dengan yang sudah disepakati.¹⁹ Dengan demikian karena telah terjadi perdamaian di antara masing-masing pihak yang bersengketa, maka upaya hukum lain seperti Banding dan Kasasi sudah pasti tidak dilakukan.²⁰

b) Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Putusan Hakim

Penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui putusan hakim dilakukan dengan berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang disampaikan oleh para pihak. Penyelesaian melalui putusan hakim ini digunakan manakala masing-masing pihak masih berkeras hati setelah upaya perdamaian atau mediasi telah dilaksanakan.²¹ Dalam hal ini Majelis Hakim adalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perkara pembagian harta

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

²⁰ H. A Damanhuri HR, **Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.57

²¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

bersama sehingga melalui dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak kemudian hakim memberikan penilaian terhadap pembuktian tersebut untuk dapat menentukan pembagian harta bersama tersebut. Penyelesaian melalui putusan hakim ini digunakan manakala masing-masing pihak masih berkeras hati setelah upaya perdamaian atau mediasi telah dilaksanakan.²²

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK sebelum adanya putusan perceraian :
 - 1) Bahwa adanya kekhawatiran Termohon dapat mengalihkan harta bersama, melakukan perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan terhadap keberadaan harta bersama mereka sebelum adanya putusan perceraian
 - 2) Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian kawin sehingga untuk melindungi harta bersama selama proses perceraian, Pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama
 - 3) Bahwa masih ada kewajiban melunasi hutang karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa *passiva* atau hutang-hutang atau kredit yang masih belum dilunasi.
 - 4) Bahwa dalam permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan belum dimohonkan pembagiannya kepada Pengadilan Agama.
 - 5) Bahwa dalam prakteknya seringkali ditemukan proses penyelesaian perkara yang lama dan bertele-tele terhadap penyelesaian perkara

²² Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

dengan bentuk permohonan (komulasi) sehingga membuat sistem peradilan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

b. Dasar Majelis Hakim tidak menerima permohonan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK adalah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama yang pada dasarnya menurut penulis adalah sudah tepat. Dalam hal pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan tersebut dikarenakan Permohonan cerai merupakan tuntutan pokok sedangkan permohonan pembagian harta bersama merupakan tuntutan yang bersifat tambahan (*accesor*) sehingga permohonan pembagian harta bersama tidak dapat diputus lebih dahulu sebelum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

2. Saran

a. Bagi para pihak dalam hal ini mengingat kedudukan harta bersama dalam perkawinan merupakan hal penting maka diperlukan kesadaran untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik oleh suami ataupun istri. Hendaknya para pihak juga lebih sadar dan mengerti hukum di Indonesia terutama hukum untuk melindungi harta dalam perkawinan. Bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebaiknya memiliki strategi dalam mengajukan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Bagi instansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat mengenai cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perceraian sehingga dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

H. A Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

H.M Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009

B. Putusan

Putusan perkara Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.Yk

Putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama.